ISU DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MASA DEPAN

(Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma'had Aly)

Syarifatul Marwiyah¹

Mohammad Dasuki²

IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

2119068401@inaifas.ac.id

Abstract

In the dynamics of pesantren education, the development of Islamic boarding schools has undergone changes and shifts in several aspects along with the progress of the times and the development of science and technology. Islamic boarding schools are slowly adopting formal educational institutions to maintain the image of the Islamic boarding schools and to maintain or increase the number of students living in the Islamic boarding schools. Ma'had Aly when viewed from the map of education including formal diniyah education, in this case the Government issued several policies related to Islamic Religious Education in Ma'had Aly. The whole series of higher education systems in the style of pesantren (Ma'had Aly) in an effort to create ulama 'which is currently a rare thing, the pesantren with a spirit of independence are able to boost back religious education that is tafaqquh fi al-din. Therefore, the government should pay more attention to providing support and assistance that is equivalent to other Islamic higher education.

Keyword: Education Policy and Ma'had Aly

Abstrak

Dalam dinamika pendidikan pesantren perkembangan pondok pesantren telah mengalami perubahan dan pergeseran dalam beberapa aspek seiring kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pondok pesantren perlahan-lahan mengadopsi lembaga pendidikan formal untuk mempertahankan citra pondok pesantren serta mempertahankan atau menambah jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren. Ma'had Aly jika dilihat dari peta pendidikan termasuk pendidikan diniyah formal, dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait Pendidikan Agama Islam yang ada di Ma'had Aly. Seluruh rangkaian dari sistem pendidikan tinggi ala pesantren (Ma'had Aly) dalam upaya menciptakan ulama' yang pada saat ini merupakan hal yang langka, maka pesantren dengan jiwa kemandiriannya mampu mendongkrak kembali pendidikan agama yang tafaqquh fi al-din. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dengan memberikan dukungan dan bantuannya yang setara dengan pendidikan tinggi islam lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan dan Ma'had Aly

¹ Dosen IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

² Dosen IAI Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam jika dilihat dari segi teoritis maupun pelaksanaannya merupakan bagian dari kebudayaan. Sementara kebudayaan itu sangat beragam, kebudayaan sangat dipengaruhi atau berinti ideologi hidup yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu rumusan mutlak mengenai pendidikan akan sulit ditentukan.³ Di sisi lain Pendidikan Islam bisa mencakup empat persepsi: *pertama*, Pendidikan Islam dalam pengertian materi; *kedua*, Pendidikan Islam dalam pengertian institusi; *ketiga*, Pendidikan Islam dalam pengertian kultur dan aktifitas; *keempat*, Pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang Islami.⁴

Dalam penelitian Zamakhsyari Dhofier yang dilakukan mulai tahun 1977-1978 disebutkan bahwa bentuk lembaga-lembaga pendidikan (pengajian) sangat bertingkat-tingkat. Bentuk terendah bermula pada waktu anak-anak berumur 5 tahun, menerima pelajaran dari orangtuanya berupa hafalan surat-surat pendek. Saat anak berusia 7 atau 8 tahun mulai diajarkan membaca huruf-huruf arab dan secara bertahap diajarkan cara membaca Al-Qur'an oleh orangtuanya sendiri, saudaranya, atau belajar di rumah tetangga atau di langgar yang biasanya diberikan setelah sholat magrib. Bagi beberapa anak dari keluarga tertentu pendidikan membaca Al-Qur'an merupakan jenjang pertama, mereka masih melanjutkan pelajaran untuk dapat membaca dan menterjemahkan buku-buku klasik yang elementer yang ditulis dari Bahasa Arab. Sebagian mereka ada yang berambisi menjadi ulama sehingga mereka memperdalam bahasa arab sebagai alat untuk memperdalam ilmu-ilmu agama yang lainnya yang tentu diperlukan guru terdidik dan berbobot serta pendidikan yang sistematis. Ini dapat diperoleh di pesantren-pesantren. Untuk masa sekarang mereka dapat memperolehnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN).⁵

³ Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, 25.

⁴ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS*, 1.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, 20.

Pesantren dalam perjalanan sejarahnya berhasil mengukir prestasi dan kekhasan terutama menyangkut: (1) Penghayatan mental spiritual keagamaan dan *tafaqquh fi ad-din*, (2) Pelestarian nilai-nilai keagamaan seperti: kesederhanaan, keikhlasan, ukhuwah, kebaktian dan keswadayaan, (3) Lebih condong pada pengutamaan *sosial effect* daripada *civil effect*, (4) Melahirkan pemimpin, baik formal maupun non formal yang berpengaruh bagi masyarakat dan lingkungannya; dan (5) Penyebarluasan dakwah Islam yang telah melahirkan umat islam sebagai mayoritas dari tata susunan masyarakat Indonesia.⁶

Dalam perkembangannya, pondok pesantren menjelma sebagai lembaga sosial yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranannya pun berubah menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan agen pembangunan masyarakat. Sekalipun demikian apapun usaha yang dilakukan pondok pesantren tetap saja menjadi khittah berdirinya dan tujuan utamanya adalah *tafaqquh fi al-din* dengan menekankan pentingnya nilai-nilai, tata aturan dan nilai agama islam sebagai pedoman kesalehan individual dan kesalehan sosial, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Taubah [9]: 122.

Dalam dinamika pendidikan pesantren perkembangan pondok pesantren telah mengalami perubahan dan pergeseran dalam beberapa aspek seiring kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman moderen ini, pondok pesantren yang dulunya hanya menyelenggarakan pendidikan diniyah saja maka perlahan-lahan

⁶ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, 192.

mengadopsi lembaga pendidikan formal untuk memepertahankan citra pondok pesantren serta memepertahankan atau menambah jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren.

Ma'had Aly jika dilihat dari peta pendidikan termasuk pendidikan diniyah formal. Ma'had Aly dibentuk dalam rangka mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki integritas ilmiah, amaliah dan khuluqiyah yang berkualitas dan memiliki nilai strategis dengan berorientasi pada keadilan, kesetaran, keterbukaan, kejujuran, kepercayaan dan kerakyatan. Ma'had Aly diadakan, diselenggarakan dan dikembangkan dari ajaran Islam, proses pengelolaannya secara islami dan menuju apa yang diinginkan oleh Pendidikan Islam. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait Pendidikan Agama Islam yang ada di Ma'had Aly.

Tilaar dan Nugraha mengemukakan Kebijakan pendidikan menjadi bagian sektoral dari kebijakan publik.: "...Kebijakan pendidikan merupakan salah satu turunan dari kebijakan publik, di mana kebijakan publik di negara berkembang dipahami sebagai kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan prioritas. Pada kondisi seperti ini, kebijakan pendidikan tidak jarang "mengalah" terhadap kebijakan sektoral lainnya. Di negara-negara bekembang kebijakan pembangunan infrastruktur fisik, kebijakan pertahanan dan keamanan dan kebijakan politik menjadi lebih dikedepankan daripada kebijakan pendidikan. Akibatnya, kemajuan pendidikan berjalan agak lambat, dan pendidikan tidak dapat menjadi pilar utama kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Duke dan Canady mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah kebijakan, yakni kebijakan sebagai: 1) maksud dan tujuan, (2) sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, (3) panduan tindakan diskresional, (4) strategi yang

⁷ H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, 364.

diambil untuk memecahkan masalah, (5) perilaku yang bersanksi, (6) norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif, (7) keluaran sistem pembuatan kebijakan dan (8) pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁸

Mengikuti kerangka kerja analisis dan penilaian kebijakan publik (*a framework for public analysis and policy evaluation*) sebagaimana dikemukakan Theo Jans terkait dua kelompok permasalahan kebijakan, maka berangkat dari teori tersebut dalam penelitian ini ditemukan beberapa rumusan permasalahan, di antaranya: 1) Apa saja masalah-masalah/isu-isu yang melatarbelakangi perumusan kebijakan pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly? 2) Kebijakan apa saja yang pemerintah keluarkan tentang Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly? 3) Bagaimana akibat yang timbul dari adanya kebijakan-kebijakan pemerintah tentang Ma'had aly? dan 4) Bagaimanakah tren Pendidikan Agama Islam di masa depan?

PEMBAHASAN

Konseptualisasi Ma'had Aly

Kata Ma'had Aly secara etimologi berarti pesantren tinggi atau dengan kata lain setingkat dengan perguruan tinggi. Dalam konteks pesantren, sebagai sebuah institusi Ma'had Aly adalah pendidikan tinggi keagamaan yang merupakan lanjutan dari pendidikan diniyah tingkat 'Ulya. Dari segi sosiologis, Ma'had Aly dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk usaha institusionalisasi tradisi dan etika kesarjanaan di lingkungan pesantren yang berbasis pada program takhassus yang telah berkembang di lingkungan pesantren.

Pada akhir abad ke 20, sebagian pesantren mengalami perubahan yang disebabkan oleh penyesuaian kurikulum dengan aturan pendidikan formal. Dilatarbelakangi oleh keprihatinan para kiai sepuh, pengasuh dan pemikir pondok pesantren di Indonesia terhadap semakin maju dan berkembangnya pesantren-pesantren dalam melakukan perubahan substantif

⁸ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, 3.
5 | Falasifa, Vol. 12 Nomor 1 Maret 2021

ini dikhawatirkan tidak hanya terjadi penyempitan jumlah ulama' fiqih (fuqaha') yang menjadi ciri khas pesantren salafi, tetapi juga diikuti penurunan output pesantren yang dipandang berdampak negatif pada masa depan umat islam.⁹

Munculnya Ma'had 'Aly dilatarbelakangi oleh langkahnya pendidikan formal yang secara khusus mencetak ulama' dalam masyarakat, meskipun banyak sekali perguruan tinggi islam. Seiring dengan peningkatan modernisasi, kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia terus berubah dan berdampak pada pola keberagamaan yang lebih rasional dan fungsional. Implikasi dari hal tersebut adalah otoritas keulama'an harus berhadapan dengan aneka tuntutan masyarakat pada sebuah kehidupan masyarakat yang cenderung pragmatis.¹⁰

Fenomena yang terjadi di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo Jawa Timur, berawal dari semangat sejumlah ulama' yang turut memikirkan masa depan pesantren untuk *sowan* (menghadap) kepada KH. As'ad Syamsul Arifin mengadukan kekhawatiran tersebut. Ternyata KH. As'ad pun merasakan hal yang sama. Beliau mengusulkan untuk mencari kader-kader unggul dari masing-masing pesantren untuk digembleng dan di training secara khusus dan di tempat khusus dengan tujuan mencetak kader *faqihu zamanihi* (ahli ilmu agama di zamannya), ulama' yang mempunyai integritas keilmuan memadai dan mampu menjawab persoalan-persoalan di sekitarnya, sekaligus menjadi uswah hasanah bagi umat.¹¹ Dari sinilah muncul Ide mendirikan Ma'had Aly, model pendidikan tinggi diniyah Ma'had Aly (pesantren tinggi) sebagai institusi pendidikan tinggi pasca pesantren.

Ide K.H. As'ad Samsul Arifin, tentang pendirian Ma'had Aly sempat mengendap beberapa saat (mungkin karena kesibukan masaykihi). Ide ini muncul kembali , ketika peringatan khaul akbar KH. Syamsul Arifin tahun 1989. Saat itu KH. Hasan Basri, Lc., salah

⁹ Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?*, 15.

¹⁰ Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Naskah Dan Kurikulum Ma'had Aly, Bagian Proyek Peningkatan Ma'had 'Aly.*, 4.

¹¹ Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?*, 16.

seorang pengurus teras pondok pesantren Salafiyah, Syafi'iyah membacakan wasiat KH. Hasyim Asy'ari yang berbunyi : *"Kamu As'ad supaya banyak mencetak kader-kader fuqaha' di akhir zaman"*. Kemudian setelah acara haul beliau mengumpulkan para kiai di kediaman kiai sebelah barat. Dari pertemuan ini dibentuk tim kecil untuk membahas langkah-langkah teknis pendirian Ma'had Aly. Tim ini diketuai oleh KH. Hasan Basri, Lc., (Situbondo) yang beranggotakan: KH. Abdul Wahid Zaini, SH., (Problinggo), KH. Yusuf Muhammad, LLM (Jember), KH. Nadhir Muhammad (Jember), KH. Khatib Habibullah (Banyuwangi), dan KH. Afifuddin Muhajir (Situbondo).¹²

Setelah pembicaraan di kediaman KH. As'ad, pembicaraan mengenai langkah awal yang harus diambil dan dilaksanakan di kediaman KH. Khatib Habibullah dengan agenda pembahasan secara intensif menyangkut silabi, tenaga edukatif dan lain sebagainya. Dalam waktu kurang lebih tujuh bulan, dari berbagai pertemuan dan kajian intensif terangkum beberapa konsep yang cukup matang tentang pendirian Ma'had Aly dan dipresentasikan dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh beberapa tokoh ulama diantaranya KH. Moh. Tholchah Hasan, KH. Ali Yafi, KH. Sahal Mahfudz, Prof. KH. Ali Hasan Ad-Dariy An-Nahdi dan KH. Masdar F. Mas'udi.¹³

Meskipun konsep rancangan pendirian Ma'had Aly telah cukup matang, namun belum lengkap bagi beliau sebelum mendapat restu mashayikh Indonesia diantaranya adalah KH. Ali Ma'sum dan restu dari mashayikh Makkah Al-Mukarromah seperti Syekh Yasin Al-Fandany, DR. Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky, Syekh isma'il bin Utsman al-Yamany. Setelah mendapat restu dari para ulama' barulah secara resmi beliau mendirikan sebuah lembaga pasca pesantren pertama di Indonesia pada tanggal 21 Pebruari 1990, yang kemudian dikenal dengan Al-Ma'had aly li al-Ulum al-Islamiyyah Qism al-Fiqh.¹⁴

¹² Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?*, 17.

¹³ Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?*,

¹⁴ Mufidah Ch, *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?*,

Sebagai lembaga pendidikan tinggi diniyah pondok pesantren, Ma'had Aly Situbondo di proyeksikan menjadi pusat pengembangan fikih sebagai respon atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Pengembangan kajian fikih di Ma'had Aly Sukorejo mempunyai kekhasan karena menempatkan *ushul fiqh* sebagai metode *istimbath* hukum pada posisi sentral dalam kajian fikih dan perumusan hukum secara operasional. Dengan pola seperti itu kajian fiqh di Ma'had Aly tidak hanya bersifat *qawli* dan tekstual, tetapi juga manhaji atau metodologis sehingga dapat memunculkan preskripsi fiqh secara kontekstual.¹⁵

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Ma'had Aly bersifat idependen. Dalam artian Ma'had Aly bebas menentukan arah kebijakan dan kurikulum sendiri. Salah satu bentuk independensi kebijakan tersebut tampak pada perjenjangan pendidikan, dimana pada lembaga tersebut memiliki *Madrasah I'dadiyah* (persiapan) setara strata satu dan Ma'had Aly (setingkat program magister, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bagais Nomor : 353/Dj.II/2004) yang masing-masing masa studinya adalah tiga tahun. Bahkan sejak tahun 2011/2012, Ma'had Aly Sukorejo dipercaya oleh Kementrian Agama RI sebagai pilot project penyelenggara kader Ahli *fiqh/ushul fiqh* bagi dosen PTAIN se-Indonesia, yang semuanya mendapat beasiswa dari Direktrat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.

Pada saat ini, di Indonesia ada lebih dari 13 Ma'had Aly yang tersebar di berbagai daerah. Beberapa di antaranya adalah:

1. Ma'had Aly Saidusshiddiqiyyah adalah Pondok Pesantren As-Shiddiqiyyah Kebon Jeruk DKI Jakarta, mengambil takhasus atau spesialisasi : Sejarah dan Peradaban Islam dalam bahasa Arabnya : Tarikh islami wa Tsaqofatuhu.
2. Ma'had Aly Syekh Ibrahim Al-Jambi adalah pondok Pesantren Al-As'ad kota Jambi di Jambi, mengambil program takhasus "Fiqh dan Ushul fiqh" (fiqh wa Ushuluhu).

¹⁵ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS*, 92. Falasifa, Vol. 12 Nomor 1 Maret 2021 | 8

3. Ma'had Aly Sumatra Thawalib Parabek adalah Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek, Agam di Sumatra Barat, program studi takhasus "Fiqh dan Ushul fiqh" (fiqh wa Ushuluhu).
4. Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya adalah Pondok Pesantren Ma'hadul 'Ulum Ad-Diniyyah Al-Islamiyyah (MUDI) Mesjid Raya, Bireun di Aceh, program studi takhasus "Fiqh dan Ushul fiqh" (fiqh wa Ushuluhu).
5. Ma'had Aly As'adiyah adalah Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang di Sulawesi Selatan, program studi takhasus "Tafsir dan Ilmu Tafsir" atau Tafsir wa Ulumuhu.¹⁶

Rumusan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly

Kelahiran Ma'had Aly direspon positif oleh Departemen Agama RI dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama tentang Ma'had Aly Nomor 284 tahun 2001 pasal 1 sampai pasal 4 sebagai berikut :

Pasal 1

Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi;

Pasal 2

Dasar Ma'had Aly adalah islam dan pancasila;

Pasal 3

Visi Ma'had Aly Menjadi pusat studi islam dan pendidikan ulama terdepan di Indonesia;

Pasal 4

Misi Ma'had Aly :

- a. Mengadakan kajian Islam secara menyeluruh dan utuh atau komprehensif agar bangsa dan Negara Indonesia mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada jati dirinya;

¹⁶ "Lispedia.blogspot.co.id. Pengertian Ma'had Aly Dan 13 Ma'had Aly Di Indonesia.," diakses tanggal 2 Mei 2020.

- b. Mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang mampu mengembangkan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) lengkap dengan pemanfaatannya dalam bingkai ajaran islam.¹⁷

Kebijakan Pendidikan Islam di pesantren, khususnya berkenaan dengan Ma'had Aly selanjutnya diatur dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bagian Kesembilan tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1-5 sebagai berikut :

- 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 2) Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- 4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang sejenis.
- 5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁸

Kebijakan selanjutnya tentang Ma'had Aly adalah Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya

¹⁷ "https://www.google.co.id/amp/S/Alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/Panduan-Pendirian-Mahad-Aly/amp," diakses tanggal 2 Mei 2020.

¹⁸ "Pendis.kemenag.go.id. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," diakses tanggal 2 Mei 2020.

Isu Dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan

melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

- 2) pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- 3) pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- 4) pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 20

- 1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi.
- 2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memsukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- 3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

- 4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.¹⁹

Dalam UU No 12 tahun 2012 yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, Ma'had Aly termasuk pendidikan tinggi keagamaan yang diatur dalam pasal 30 pasal 1-3 sebagai berikut :

- 1) Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- 2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk Ma'had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dalam peraturan pemerintah.²⁰

Ketika PP No 55 tahun 2007 telah diundangkan, maka Menteri Agama menetapkan PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, PMA No.3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan PMA No.13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian agama. Akan tetapi ketika PMA No.16 tahun 2010 dan PMA No 13 Tahun 2012 gencar disosialisasikan, tidak demikian halnya dengan PMA No.3 Tahun 2012, karena PMA yang ditandatangani tanggal 21 pebruari 2012 dan terdaftar dalam lembaran negara pada tanggal 24 Pebruari 2012, belum sampai 4 bulan sejak ditetapkan, bahkan belum ditindaklanjuti dalam bentuk action/ sosialisasi, pada tanggal 19 Juni 2012 Menteri Agama telah menetapkan PMA N0.9 Tahun 2012 tentang pencabutan PMA No.3 Tahun 2012.²¹

¹⁹ "https://Babel,kemenag.go.id.pp Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan," diakses tanggal 2 Mei 2020..

²⁰ "https://Portal.mahkamah Konstitusi.go.id,undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan" diakses tanggal 2 Mei 2020.

²¹ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS*, 94. Falasifa, Vol. 12 Nomor 1 Maret 2021 | 12

Kebijakan tentang Ma'had Aly selanjutnya dituangkan dalam PMA No.71 Tahun 2015 tentang peraturan Menteri Agama tentang Ma'had Aly yang ditetapkan di Jakarta 23 November 2015 yang terdiri dari beberapa bab yaitu :

1. Bab I tentang ketentuan Umum.
2. Bab II tentang pendirian Ma'had Aly.
3. Bab III tentang penyelenggaraan Ma'had Aly.
4. Bab IV tentang pengelolaan Ma'had Aly.
5. Bab V tentang penjaminan mutu.
6. Bab VI tentang pembinaan dan pengawasan.
7. Bab VII tentang Akreditasi.
8. Bab VIII tentang sanksi.
9. Bab IX tentang ketentuan penutup.²²

Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly

Secara teoritik, makna kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kebijakan publik, di mana rumusan definisinya banyak dikemukakan oleh para ahli kebijakan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya *Power and Society* memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practices*). David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*). Thomas R Dye memberikan definisi bahwa kebijakan publik adalah *What government do, why*

²² "Itjen.kemenag.go.id. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma'had Aly,," diakses tanggal 2 Mei 2020.

they do it, and what difference it makes (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil apa yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.²³

Setiap produk kebijakan, umumnya dilahirkan dari proses analisis terhadap variabel-variabel rumusan kebijakan itu sendiri. Sehingga analisis kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kebijakan. Ann Majchrzak tidak membedakan antara analisis kebijakan dengan penelitian kebijakan, keduanya untuk merumuskan kebijakan. Pemikiran Majchrzak tidak berbeda dengan pemikiran Meyer dan Ernest yaitu : “... penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat, tujuan dalam pembuatan kebijakan...Penelitian kebijakan dapat dipikirkan sebagai penelitian sosial terapan karena penelitian kebijakan mempunyai fokus utama dengan penelitian sosial terapan yaitu dalam masalah pemecahan masalah praktis...penelitian kebijakan berorientasi kepada tujuan, dalam arti bahwa dalam penelitian ini cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan, begitu pula pada alat yang dilibatkan dalam suatu arah tindakan yang diusulkan... penelitian kebijakan memiliki suatu perspektif sistem, artinya perhatian diarahkan pada kepada tujuan keseluruhan satuan sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan yang diusulkan...penelitian kebijakan berpusat pada tindakan. Fungsi yang terakhir bukan semata-mata untuk menghasilkan predictor atau descriptor mengenai kondisi-kondisi atau mengenai kebutuhan di mana kebutuhan kebijakan harus disampaikan, melainkan juga menghasilkan dan memvalidasi tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”²⁴

Danim mendefinisikan penelitian kebijakan sebagai berikut: “...penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka

²³ Harold Laswell, Abraham Kaplan, *Power and Society*, 71.dalam M.Nafiur Rofiq, Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah, Yogyakarta, Absolute Media, 2011, p. 32.

²⁴ Robert P. Meyer & Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, 66–67. Dalam M.Nafiur Rofiq, Potret Kebijakan Pendidikan Diniyah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah, Yogyakarta, Absolute Media, 2011, p. 32.

pemecahan masalah sosial...penelitian kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan...kehasan penelitian kebijakan terletak pada fokusnya , yaitu berorientasi kepada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang unik, yang jika tidak segera dipecahkan akan memberi efek negative yang sangat luas...”.²⁵

Berdasarkan dengan pemahaan di atas, perlu disepakati bahwa proses kebijakan publik terdiri dari: rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan, sebagaimana deskripsi gambar berikut :

Hough menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.²⁶

Analisis kebijakan secara komprehensif menurut Ace Suryadi dan Tilaar setidaknya meliputi : 1) analisis ekonomi, dimaksudkan untuk melihat apakah suatu gagasan kebijakan benar-benar dapat diterapkan terutama jika dihubungkan dengan dukungan anggaran yang tersedia dan kemungkinan kenaikan anggaran pendapatan negara di masa depan; 2) analisis politis, dimaksudkan untuk menguji suatu gagasan kebijakan apakah memiliki dukungan secara politis atau tidak; 3) analisis sosiokultural, dimaksudkan untuk melakukan kajian mengenai kemungkinan suatu kebijakan diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap

²⁵ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, 23.

²⁶ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, 3.

kehidupan berbudaya dan bermasyarakat; dan 4) analisis administratif, merupakan suatu cara untuk menguji usulan gagasan kebijakan berdasarkan pertimbangan apakah gagasan tersebut benar-benar dapat dijabarkan menjadi kegiatan yang lebih operasional di dalam suatu sistem manajemen.²⁷

Pemilahan analisis kebijakan dapat juga seperti dalam tabel berikut :

Analysis of Policy	Analysis for Policy
Penelitian tentang isi kebijakan	Analisis untuk merumuskan kebijakan
Penelitian tentang implementasi kebijakan	Analisis untuk memprediksi impact kebijakan
Penelitian tentang kinerja kebijakan	Analisis untuk memperbaiki isi kebijakan
Penelitian tentang lingkungan kebijakan	Analisis untuk memperbaiki implementasi kebijakan
Penelitian tentang proses kebijakan	Analisis untuk memperbaiki proses kebijakan

Dari deskripsi diatas isu-isu dan analisis kebijakan Pendidikan Agama Islam Masa Depan (Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly) dapat ditelaah dari beberapa titik yaitu: 1) Analisis proses kebijakan meliputi; *Pertama*, kemunculan isu dan identifikasi masalah, *Kedua* perumusan dan otorisasi kebijakan, *Ketiga* Analisis konteks kebijakan pendidikan implementasi kebijakan, *Keempat* perubahan atau pemberhentian kebijakan. 2) Analisis pelaku kebijakan (Analisis politis). 3) Analisis impact kebijakan (Analisis sosiokultural). 4) Analisis Kelemahan dan Kekuatan.

1. Analisis Proses Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly

Munculnya isu untuk membentuk Ma'had Aly berawal dari kegelisahan para kyai dan para pemikir pondok pesantren yang melihat langkahnya pendidikan formal yang secara khusus mencetak ulama' yang mutafaqqih fi al-din meskipun banyak perguruan

²⁷ Ace Suryadi & H.A.R.Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar*, 63.

tinggi islam. Santri-santri dari pondok pesantren yang mendalami ilmu-ilmu fiqih beserta ilmu alatnya (seperti ushul fiqih, bahasa arab, ilmu tafsir, nahwu, shorof dsb) lebih mendalam ilmunya daripada lulusan S1 dari fakultas Syari'ah suatu Perguruan Tinggi Agama Islam baik Negeri maupun swasta.

Arus modernisasi berdampak pada pondok pesantren, sebagian pesantren mengalami perubahan yang disebabkan oleh penyesuaian kurikulum dengan aturan pendidikan formal. Semakin maju dan berkembangnya pesantren-pesantren dalam melakukan perubahan substantif ini dikhawatirkan tidak hanya terjadi penyempitan jumlah ulama' fiqih (fuqaha') yang menjadi ciri khas pesantren salafi, tetapi juga diikuti penurunan output pesantren yang dipandang berdampak negatif pada masa depan umat Islam.

Sedikit demi sedikit peran ulama' dan pondok pesantren mulai ditinggalkan dalam dunia pendidikan maupun persoalan kenegaraan. Dalam hal ini negara hanya memfasilitasi IAIN yang dipersiapkan untuk mengisi posisi departemen agama. Untuk melengkapi lembaga pendidikan yang berbasis islam dan pemenuhan akademik keislaman, maka dibutuhkan suatu lembaga atau institusi pendidikan yang berbasis pondok pesantren yang mengkaji kitab turast (kitab kuning) bagi mahasiswa yang merupakan calon ulama yang berwawasan kekinian.

Para kyai dan pemikir pondok pesantren mempertimbangkan model pendidikan tinggi diniyah Ma'had Aly (pesantren tinggi) sebagai salah satu alternatif pilihan yang bertujuan mempersiapkan kader-kader ulam' yang memiliki integritas ilmiah, amaliah dan khuluqiyah yang berkualitas dan memiliki nilai strategis dengan berorientasi pada keadilan, kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, kepercayaan dan kerakyatan.

Dari berbagai macam isu dan masalah diatas maka berdasarkan pertemuan antara para kyai dengan menteri Agama yakni K.H.Tolkhah Hasan pada tanggal 01-05 Agustus

1995 di Bogor, tanggal 10-12 Desember 1999 di Surabaya, tanggal 05-06 Maret 2000 di Surabaya, 23-24 September di Malang dan tanggal 16-18 Desember 2000 maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No 284 Tahun 2001 pasal 1-4 dengan beberapa rumusan yang mendefinisikan Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi dengan dasar islam dan pancasila yang memiliki visi menjadi pusat studi islam dan pendidikan ulama terdepan di Indonesia dan misi mengadakan kajian islam secara menyeluruh dan utuh atau komprehensif agar bangsa dan Negara Indonesia mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpijak pada jati dirinya, mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren yang mampu mengembangkan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) lengkap dengan pemanfaatannya dalam bingkai ajaran Islam.²⁸

Setelah KMA 284/2001 diimplementasikan dan tidak terjadi perubahan atau pemberhentian kebijakan, keluarlah UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 30 ayat 1-5 yang didalamnya diatur tentang pendidikan keagamaan islam. Disebutkan dalam pasal 30 tersebut :Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera dan bentuk lain yang

²⁸ “<https://www.google.co.id/Amp/S/Alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/Panduan-Pendirian-Mahad-Aly/Amp/>,” diakses tanggal 2 Mei 2020.

sejenis. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁹

Dalam UU No. 20/2003 pasal 30, Ma'had Aly termasuk pendidikan diniyah, pendidikan diniyah merupakan bentuk pendidikan keagamaan islam. Dinyatakan bahwa “pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Kebijakan selanjutnya tentang Ma'had Aly adalah Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya³⁰.

Dalam PP 55 tahun 2007 Pasal 15 disebutkan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

²⁹ “Pendis.kemenag.go.id. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” diakses tanggal 2 Mei 2020.

³⁰ “<https://Babel.kemenag.go.id/pp> Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,” diakses tanggal 2 Mei 2020.

pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 20 disebutkan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi.³¹ Dalam penjelasan pasal 20, ayat (1) dinyatakan bahwa: “ Pendidikan Diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma’had Aly”. Dalam prakteknya Ma’had Aly adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu agama islam (*mutafaqqih fiddin*) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.

Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan UU No 12 tahun 2012 yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012, Nama “Ma’had Aly” disebut dalam undang-undang ini yakni dalam pasal 30 ayat 2 yaitu Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk Ma’had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis³². Dengan keluarnya UU No.20/2003, PP No 55 tahun 2007, UU No.12/2012 maka payung hukum tentang Ma’had Aly semakin kuat. Dan lebih kuat lagi dengan keluarnya PMA No. 71/2015 yang menjelaskan khusus tentang Ma’had Aly.

2. Analisis pelaku kebijakan (Analisis politis).

Aktor kebijakan pendidikan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni : para pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah perorangan atau lembaga yang legal yang memiliki tanggungjawab dengan pendidikan. Dalam aktor kebijakan resmi maka akan dibagi mengikuti sistem pemerintahan negara yang dikaji

³¹ “<https://Babel.kemenag.go.id/pp> Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,” .

³² “<https://Portal.mahkamah.konstitusi.go.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-keagamaan>” diakses tanggal 2 Mei 2020.

mulai dari pejabat senior hingga partai politik, lembaga pendidikan dan lembaga yang terkait dengan pendidikan dan antar badan antar pemerintah.³³

Pelaku tidak resmi kebijakan pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik dan media. Kelompok kepentingan ini antara lain sarikat guru, asosiasi yang mewakili jenis atau jenjang pendidikan tertentu, asosiasi yang mewakili peserta didik, asosiasi yang mewakili pimpinan perguruan tinggi, hingga asosiasi yang mewakili orangtua peserta didik.

3. Analisis impact kebijakan (Analisis sosiokultural)

Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2001 maka tentang Ma'had Aly memberikan legalitas penyelenggaraan Ma'had Aly di Indonesia. Namun kualitas dan prestasi akademik yang dicapai oleh ma'had Aly dinilai masih sangat lemah karena tidak mengacu pada Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas tentang Penyelenggaraan Ma'had Aly.

Ma'had Aly di Indonesia pada awalnya muncul dari beberapa pesantren terutama di Jawa sebagai upaya pengembangan dari program Takhassus yang merupakan jenjang pendidikan tingkat tinggi dalam tradisi pendidikan pesantren khususnya yang mempertahankan sistem klasik. Pada umumnya institusi takhassus ini bersifat non formal dan pengelolaannya tidak pernah berurusan dengan pemerintah untuk mendapat pengakuan dan penyetaraan secara formal namun dari segi efektifitas dapat dikatakan berhasil dan kualitasnya dapat diunggulkan.

Setelah KMA 284/2001, Peraturan tentang Ma'had Aly lebih jelas dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang itu walau tidak secara eksplisit menyebutkan kata "Ma'had Aly" akan tetapi ada kata "pendidikan keagamaan"

³³ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, 5
21 | Falasifa, Vol. 12 Nomor 1 Maret 2021

berbentuk pendidikan diniyah atau pesantren yang dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Ma'had Aly adalah model pendidikan tinggi diniyah yang dapat digolongkan menjadi dua jenis. *Pertama*, Ma'had Aly formal yang mengikuti aturan perguruan Tinggi (PT), yakni Ma'had Aly yang secara kelembagaan organisasional dan administratif memang menyelenggarakan pendidikan tingkat tinggi yang berbasis pada tradisi intelektual dan keilmuan pondok pesantren yang proses pembelajarannya tidak hanya mengandalkan pembacaan literatur dan pemahaman tekstual dari isi kitab dan pemikiran para ulama', melainkan telah masuk pada analisis isi (*Dirosah Tahliliyah*), pembacaan kontekstual (*Qiroah siyaqiyah*) dan kritik atas isi kitab dan pemikiran ulama' tersebut (*Dirosah Naqdhiah*).

Kedua, Ma'had Aly takhassus yang tidak terikat dengan perguruan tinggi. Ma'had aly secara substansial yang tidak dilengkapi dengan kerangka kelembagaan dan organisasi administratif secara khusus dalam mengelola sistem penyelenggaraan pendidikan, akan tetapi dalam praktiknya pendidikan Ma'had Aly tetap dilaksanakan.

Setelah UU Nomor 20 tahun 2003, pada tahun yang sama Ma'had aly Sukorejo ditunjuk Direktorat Pekapontren Departemen Agama RI menjadi *pilot project* penyelenggaraan Ma'had Aly se-Indonesia. Pada akhir tahun 2004, Ma'had Aly Sukorejo memperoleh SK penyetaraan dengan program S2 (Magister Hukum Islam) di lingkungan PTAI dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. Penyetaraan Ma'had Aly dilakukan melalui usulan dari Ma'had Aly ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Legalitas formal hanya dikeluarkan oleh BSNP, tetapi penentuan ditentukan oleh rumusan yang disepakati. Direktur pendidikan keagamaan dan pondok pesantren Depag RI (Direktorat Pekapontren hanya mengesahkan usulan yang diajukan dalam setiap Ma'had Aly yang bersangkutan) (Amin Haidari). Pada tahun

2011/2012 Ma'had Aly Sukorejo mendapat kepercayaan dari Kementrian Agama untuk membina kader ulama ahli fikih yang terdiri atas dosen-dosen PTAIN (UIN, IAIN, STAIN) seluruh Indonesia.

Pada Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan PP No 55/2007 Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi.³⁴ Dalam penjelasan pasal 20, ayat (1) dinyatakan bahwa: “ Pendidikan Diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma'had Aly”.

Melihat isi dari peraturan pemerintah itu jelas bahwa pondok pesantren dianggap mampu melaksanakan pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi. Pemerintah juga memberikan wewenang untuk hal tersebut dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendirikan Ma'had Aly yakni minimal terakreditasi B+ atau A. Pengawasan dan akreditasidilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh dirjen yang terdiri dari unsur Departemen Agama dan Dewan Ma'had Aly.

Tahun 2012, pemerintah mengundang-undangan UU No.12 tahun 2012. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa 30 ayat 2 yaitu Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan dapat berbentuk Ma'had Aly, pasraman, seminari dan bentuk lain yang sejenis³⁵. Dilihat dalam UU ini pemerintah memberikan sinyal untuk kekuatan hukum dari Ma'had Aly.

Kebijakan khusus yang membahas tentang Ma'had Aly tertuang dalam PMA nomor 71 tahun 2015. Dalam PMA ini dibahas tentang ketentuan Umum dari Ma'had Aly, pendirian Ma'had Aly, penyelenggaraan Ma'had Aly, pengelolaan Ma'had Aly, tentang penjaminan mutu, pembinaan dan pengawasan, Akreditasi dan sanksi.

³⁴ “<https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-keagamaan>” diakses tanggal 2 Mei 2020.

³⁵ “<https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-keagamaan>” diakses tanggal 2 Mei 2020.

4. Analisis Kelemahan dan Kekuatan Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Ma'had Aly

PP No.71 Tahun 2015 memberikan ruh kekuatan terhadap Ma'had Aly seperti juklak, teknis dan statuta pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan, penjaminan mutu, pembinaan dan pengawasan, Akreditasi. Semuanya telah memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu PP 71/2015 membantu mewujudkan tujuan pendidikan. Pada dasarnya tujuan pendidikan hanya satu, yaitu memanusiakan manusia, atau mengangkat harkat dan martabat manusia atau *human dignity*, yaitu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan.

Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional, barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata mendatangkan efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada, akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis, atau kebutuhan pasar lapangan, kerja, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan *social movement* (gerakan sosial) menjadi hilang.

Pendidikan di Ma'had Aly mempunyai kekuatan untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dengan metode kepesantrenannya yang berfasilitas asrama dengan segala dukungan yang disediakan pesantren Ma'had Aly mampu mencetak manusia yang berahlak mulia dengan

mengacu pada ajaran ulama' salaf yang sudah menjadi ciri dari pesantren itu sendiri. Selain itu dengan pengasramaan para mahasantri yang terdiri dari berbagai daerah mampu mencetak dan membiasakan mereka untuk menjaga kedamaian kerukunan walau berbeda-beda asal daerahnya dan dapat juga bermasyarakat dengan masyarakat sekitarnya. Dengan diimbangi mahasantri, dosen, sarana dan prasarana yang terangkai dalam sebuah sistem pendidikan yang seimbang maka akan memudahkan dalam kelancaran para santri.

Bagi Mahasantri yang menempuh pendidikan di Ma'had Aly mereka tetap mendapatkan ijazah, karena status Ma'had Aly sudah diakui oleh pemerintah. Pola pembelajaran di Ma'had aly adalah sebagaimana pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam, yaitu *thalab al'ilm*, telah memberikan semangat dikalangan muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu *hadits*, mencari guru diberbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal didalam mencari ilmu adalah *knowledge oriented*. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama *encyclopedic*, karya-karya besar sepanjang masa. Pola ini ditambah dengan kajian-kajian pada analisis isi (*Dirosah Tahliliyah*), pembacaan kontekstual (*Qiroah siyaqiyah*) dan kritik atas isi kitab dan pemikiran ulama' tersebut (*Dirosah Naqdhiyah*). Sementara, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya.

Dimungkinkan kelemahan PMA 71/2014 adalah kebijakan tentang Ma'had Aly masih sebatas Keputusan Menteri Agama. Belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Ma'had Aly.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seluruh rangkaian dari sistem pendidikan tinggi ala pesantren (Ma'had Aly) dalam upaya menciptakan ulama' yang pada saat ini merupakan hal yang langka, maka pesantren dengan jiwa kemandiriannya mampu mendongkrak kembali pendidikan agama yang *tafaqquh fi al-din*. Oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dengan memberikan dukungan dan bantuannya yang setara dengan pendidikan tinggi islam lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim Soebahar. *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonasi Guru Sampai UU SISDIKNAS*. Jakarta: RajaGravindo Persada, 9789797695552.
- Ace Suryadi & H.A.R.Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, n.d.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. *Naskah Dan Kurikulum Ma'had Aly, Bagian Proyek Peningkatan Ma'had 'Aly*. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, n.d.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harold Laswell, Abraham Kaplan. *Power and Society*. New Heaven: Yale University Press, 1970.
- "[https://Babel,kemenag.go.id/pp](https://Babel.kemenag.go.id/pp) Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan," n.d.
- "<https://Portal.mahkamah.konstitusi.go.id/undang-Undangrepublik> Indonesia Nomor 12 Tahun 2012," n.d.

- “<https://www.google.co.id/amp/s/alkhoirot.wordpress.com/2014/11/26/panduan-pendirian-mahad-aly/>,” n.d.
- “[Itjen.kemenag.go.id](http://itjen.kemenag.go.id). Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Ma’had Aly.,” n.d.
- “[Lispedia.blogspot.co.id](http://lispedia.blogspot.co.id). Pengertian Ma’had Aly Dan 13 Ma’had Aly Di Indonesia.,” n.d.
- Mahmud Arif. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Maksum. *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mudjia Rahardjo. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010.
- Mufidah Ch. *Gender Di Pesantren Salaf Why Not ?* Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010.
- Robert P. Meyer & Ernest Greenwood. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sudarwan Danim. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bina Aksara, n.d.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP#ES Anggota IKAPI, 1994.